

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

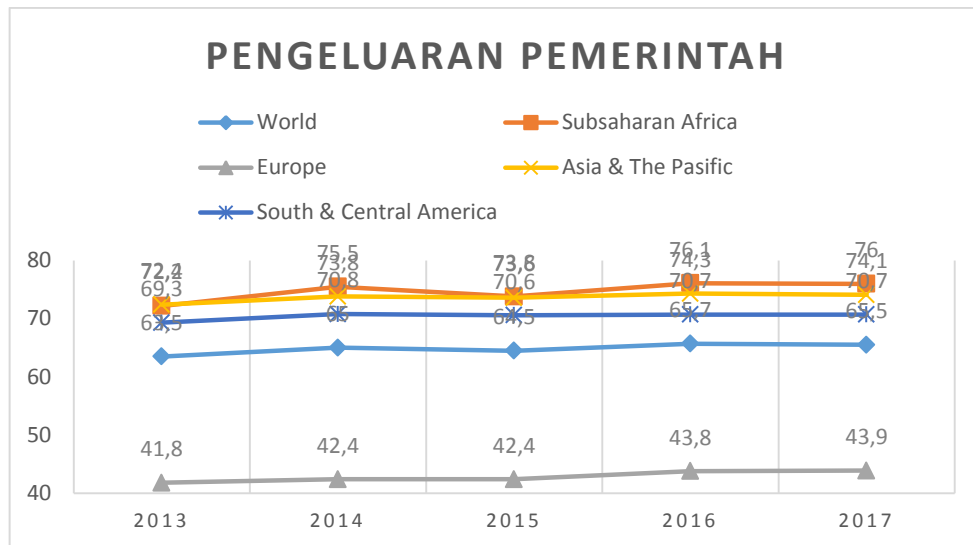
Tahun 2016 perekonomian dunia dihadapkan pada beberapa masalah yang mengganggu kondisi ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi menurun, rendahnya harga komoditas, serta ketidakpastian di pasar keuangan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 3,1% turun dari tahun 2015 sebesar 3,4%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ini tidak sesuai dengan perkiraan IMF sebesar 3,2% (bps.go.id). Negara Asia yang sedang berkembang terus mendorong perekonomian global, didukung oleh permintaan yang lebih tinggi, membaiknya harga komoditas global, dan reformasi domestik. Hal ini menjadikan negara Asia sebagai kontributor pertumbuhan terbesar bagi pertumbuhan global menurut Asian Development Bank (ADB). Publikasi ekonomi tahunan yang diterbitkan oleh ADB yaitu Asia Development Outlook (ADO), menyebutkan bahwa negara Asia sebagai kontributor pertumbuhan terbesar bagi pertumbuhan global sebesar 60%, meski pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto di Asia Pasifik mencapai 5,7% turun dari tahun 2016 sebesar 5,8% (adb.org, 6/4/2017).

Negara-negara berkembang di Asia Pasifik sedang gencar melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan kegiatan yang lazim dijalankan oleh suatu negara. Proses pembangunan setiap negara akan berbeda-beda, tetapi tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah memberikan layanan utama untuk kemakmuran masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, dan berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Layanan publik serta infrastruktur tersebut membutuhkan banyak sumber daya (Aizenman, Jinjark, Kim, & Park, 2015). Tercapainya pembangunan yang optimal dipengaruhi oleh penerimaan atau pendapatan negara. Penerimaan atau pendapatan negara yang diandalkan adalah pajak. Sumber utama dari penerimaan pajak yaitu dari kontribusi masyarakat yang ada dalam suatu

negara. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang potensial dan memiliki peranan penting dalam pembiayaan atau pengeluaran pemerintah (Richard & Arianto, 2013).

Negara berkembang di wilayah Asia Pasifik mengalami penurunan rasio pajak terhadap PDB, hanya mencapai kurang dari atau sekitar 50% dari potensi pajak maksimum, hal ini dikemukakan pada studi yang disusun bersama oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) dan LSM internasional, Oxfam. Dari keseluruhan perpaduan pajak lebih condong ke arah pajak tidak langsung, sedangkan pajak penghasilan pribadi tetap kecil. Penerimaan pajak di wilayah Asia Pasifik untuk pajak langsung hanya sebesar 36,1%, berbeda dengan negara-negara OECD sebesar 55,8% dari total penerimaan pajak (dawn.com, 10/12/2017).

Penerimaan pajak merupakan sumber yang berkontribusi besar pada pendapatan negara. Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi pemungutan pajak, pajak yang dipungut oleh pemerintah bertujuan untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yaitu salah satunya berupa barang publik (Purwono, 2010). Penerimaan pajak suatu negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas dan lain sebagainya (Sukirno, 2014).



Sumber : *Index of Economic Freedom (2018)*

**Gambar 1. 1 Pengeluaran Pemerintah**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara global pada tahun 2017 sebesar 65,5%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 65,7%. Hal ini sejalan pada wilayah Asia Pasifik dan Subsaharan Afrika yang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 74,3% dan 76,1% menjadi 74,1% dan 76% pada tahun 2017. Sedangkan pada wilayah Amerika tidak mengalami perubahan pada tahun 2017 sebesar 79,7%. Berbeda halnya pada wilayah Eropa mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 43,8% menjadi 43,9% pada tahun 2017.

Hal ini dikuatkan dengan adanya berita bahwa di Singapura, belanja pemerintah sedang mengalami peningkatan. Menanggapi hal berikut pemerintah melakukan upaya dengan menaikkan pajak barang dan jasa untuk mengimbangnya, serta pemerintah melakukan upaya untuk mengendalikan biaya, karena pemerintah tidak ingin melakukan pengurangan pengeluaran pemerintah. Ahli ekonomi berpendapat bahwa pemerintah mampu membelanjakan lebih sedikit barang-barang atau dapat menargetkan subsidi dengan lebih efektif. Tentunya setiap mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak perlu ditangani secara hati-hati, serta kenaikan pajak pun perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi ([straitstimes.com](http://straitstimes.com), 23/1/18).

Feny Yusnika, 2018

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, TARIF PAJAK DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (Survei Pada Negara-Negara di Wilayah Asia Pasifik Tahun 2014-2016)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Forum Konsultasi Keuangan untuk Pembiayaan Pembangunan Asia Pasifik menyepakati mobilisasi pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan kawasan dengan membangun inovasi dalam pembiayaan pembangunan terutama dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, investasi, pembangunan manusia, isu gender dan infrastruktur (cnn.com, 30/4/2015). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Jika besar jumlah penerimaan pajak maka akan meningkatkan pula pendapatan yang diterima oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran pemerintah. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya penerimaan pajak akan berkurang pula pendapatan pemerintah yang berdampak pada pengeluaran pemerintah yang kurang optimal (Riania, 2016).

Pemerintah yang memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya dengan menyediakan barang publik dan pelayanan publik, ini berarti pemerintah berperan pula dalam perekonomian terkait dengan alokasi. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Menurut Musgrave dan Musgrave (1993) pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu : (1) peran alokasi, (2) peran distribusi dan (3) peran stabilitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Serta digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Peran pemerintah dalam alokasi adalah ketersediaan anggaran yang ada pada akhirnya terwujud pada pengeluaran pemerintah dengan wujud salah satunya fasilitas publik. Pemerintah masuk kedalam perekonomian melalui kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan (Samuelson & Nordhaus, 2004). Teori Wagner yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Begitu pula menurut Harjanto (2014) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah digunakan sebagai alat atau kebijakan penyeimbang untuk menanggapi atau pun siklus perekonomian yang terjadi. Di dunia laju

pertumbuhan ekonomi menurun semenjak tahun 2014 sebesar 3,5%, tahun 2015 sebesar 3,4% sampai dengan tahun 2016 sebesar 3,1% (bps.go.id). Namun pada kawasan Asia Pasifik, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami perkembangan pada tahun 2017 sebesar 5,8%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,4% (news.un.org, 7/5/2018).

Ditengah menurunnya perekonomian negara, laju inflasi dunia tetap stabil pada kisaran 2,8% sama dengan tahun sebelumnya. Dan inflasi harga konsumen pada regional Asia Pasifik pada tahun 2017 sebesar 3% dari 2,5% pada tahun 2016 karena permintaan konsumen yang lebih kuat dan harga komoditas global yang semakin meningkat (adb.org, 6/4/2017). Inflasi adalah gejala kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus (Rosyidi, 2012). Jika tingkat inflasi dapat dijaga dengan stabil tentu akan berdampak baik bagi kegiatan perekonomian pada suatu negara. Dampak yang ditimbulkan akan berkaitan dengan konsumsi masyarakat. Tingkat inflasi yang stabil akan berdampak pada baiknya perekonomian, dan dampak tersebut berkaitan dengan konsumsi masyarakat, maka salah satu sektor yang diuntungkan dalam hal ini adalah sektor pajak (Indriastuti, 2017).

Menurut Wibowo (2003) peneanaan tarif pajak berpengaruh terhadap memaksimalkan potensi pendapatan pajak suatu negara. Tarif pajak adalah besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar peneanaan pajak atau jumlah yang dikenakan pajak dan tarif yang ditetapkan terhadapnya (Pudyatmoko, 2009). Jika tarif pajak tinggi, wajib pajak akan enggan untuk melaporkan semua penghasilan kena pajaknya. Tarif pajak yang rendah pun akan menghambat penerimaan pajak dan berdampak pada pengeluaran pemerintah (Oktiya Damayanti, Suhadak, & Pamungkas, 2016). Di Singapura akan terjadi kenaikan tarif pajak barang dan jasa dari 7% menjadi 9% pada tahun 2021 hingga 2025, kenaikan tarif pajak ini seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, infratraktur serta keamanan diprediksi akan naik. Menurut Menteri Keuangan Singapura waktu yang tepat untuk meningkatkan tarif pajak tergantung pada tiga faktor, yaitu

kondisi perekonomian, banyaknya pengeluaran negara yang meningkat secara seberapa optimis pajak Singapura saat ini (ortax.org, 21/2/2018).

Dalam menentukan kebijakan tentunya pemerintah memerhatikan berbagai faktor salah satunya faktor internal yaitu tata kelola pemerintah yang baik. Karena masalah yang muncul ketika pendapatan negara rendah adalah ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang, salah satu karakteristik dari ketidakstabilan politik dan pergeseran perilaku pemerintah yang dapat menghambat proses reformasi jangka panjang pada sistem. Kualitas tata kelola pemerintah suatu negara merupakan faktor penting untuk menentukan kebijakan (Ajaz & Ahmad, 2010). Bird & Zolt (2008) menyatakan bahwa struktur pajak sangat responsif terhadap struktur tata kelola pemerintah yang baik, negara-negara yang berpenghasilan tinggi dapat meningkatkan kinerja pajak mereka melalui peningkatan struktur pemerintahan.

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak, seperti yang dilakukan oleh Oktiya Damayanti et al. (2016) menunjukkan jika tingkat inflasi, *economic growth* dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard dan Arianto (2013) menunjukkan bahwa inflasi dan *economic growth* tidak berkorelasi signifikan terhadap *tax revenue*, serta *tax rate* memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap *tax revenue*. Ajaz dan Ahmad (2010) menunjukkan bahwa korupsi memiliki efek buruk terhadap pengumpulan pajak, tata kelola pemerintah yang baik memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Loizides dan Vamvoukas (2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah. Berbeda halnya dengan Josaphat (2000) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Mehrara, Behzadi, dan Rezaei (2016) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Sang dan Kwang (2015) menyatakan bahwa tata kelola pemerintah yang baik berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Dan penelitian oleh

Dudzevičiūtė, Šimelytė, dan Liučvaitienė (2018) menyatakan bahwa pendapatan pajak memiliki efek positif pada pengeluaran pemerintah, begitu pula sebaliknya pengurangan pendapatan pajak akan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji ulang sesuai dengan masukan yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, terdapat hal menarik untuk diteliti mengenai penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan pengeluaran pemerintah karena terdapat teori yang mendukung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tarif Pajak dan *Good Government Governance* Terhadap Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah (Survei Pada Negara-Negara Di Wilayah Asia Pasifik Tahun 2014-2016)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak ?
2. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak ?
3. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak ?
4. Bagaimanakah pengaruh *good government governance* terhadap penerimaan pajak ?
5. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah ?
6. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pengeluaran pemerintah ?
7. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap pengeluaran pemerintah ?

Feny Yusnika, 2018

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, TARIF PAJAK DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (Survei Pada Negara-Negara di Wilayah Asia Pasifik Tahun 2014-2016)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8. Bagaimanakah pengaruh *good government governance* terhadap pengeluaran pemerintah ?
9. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.
2. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak.
3. Pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Pengaruh *good government governance* terhadap penerimaan pajak.
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah.
6. Pengaruh inflasi terhadap pengeluaran pemerintah.
7. Pengaruh tarif pajak terhadap pengeluaran pemerintah.
8. Pengaruh *good government governance* terhadap pengeluaran pemerintah.
9. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian penulis mengharapkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis yang bersangkutan mengenai penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah, menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan atau menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di Indonesia

Feny Yusnika, 2018

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, TARIF PAJAK DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (Survei Pada Negara-Negara di Wilayah Asia Pasifik Tahun 2014-2016)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



melihat atau membandingkan dengan negara-negara yang berada di wilayah Asia Pasifik.

- b) Bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak diharapkan lebih memahami kebijakan perpajakan yang berlaku agar menambah pendapatan negara dari sektor pajak, serta memahami kondisi pemerintahan dalam pengeluaran pemerintah.
- c) Bagi mahasiswa diharapkan menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan serta dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.